

Strategi Pengarusutamaan Gender Di Lembaga Non Pemerintah: Studi Kasus Di Gereja BNKP

Destri Pinta Sari Zega¹⁾, Dimpos Manalu²⁾, Vera A.R Pasaribu³⁾

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan
Jln.Sutomo No. 4a, Perintis, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 2025

Email Korespondensi: destri.zega@student.uhn.ac.id

Email: dimpos.manalu@uhn.ac.id

Email: verapasaribu@uhn.ac.id

Abstract: *This study examines gender mainstreaming strategies in the BNKP Church as a non governmental institution that plays a crucial role in the social and religious life of the community. The research aims to analyze the strategies implemented by BNKP to promote gender mainstreaming and identify the challenges that persist in the process. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, in which data is collected through in-depth interviews with BNKP Synod office administrators and female pastors. The findings indicate that BNKP has implemented various gender mainstreaming strategies, such as providing access to theological education for women, creating opportunities for them to become pastors, and organizing women's empowerment programs. Despite progress in gender mainstreaming within BNKP, further efforts are required to ensure more substantive equality, as BNKP still faces challenges, including a deeply rooted patriarchal culture, gender stereotypes that limit women's roles in leadership, and the double burden that women continue to bear.*

Keywords: *Gender Mainstreaming, Gender Equality, Women's Leadership, BNKP.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji strategi pengarusutamaan gender di Gereja BNKP sebagai lembaga non pemerintah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah diterapkan BNKP dalam mendorong pengarusutamaan gender serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus kantor sinode BNKP dan pendeta perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNKP telah menerapkan berbagai strategi pengarusutamaan gender, seperti memberikan akses pendidikan teologi bagi perempuan, membuka kesempatan bagi mereka untuk menjadi pendeta, serta mengadakan program pemberdayaan perempuan. Meskipun terdapat kemajuan dalam pengarusutamaan gender di BNKP, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kesetaraan yang lebih substantif, karena BNKP masih menghadapi tantangan termasuk budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat, stereotipe gender yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, serta beban kerja ganda yang masih harus ditanggung oleh perempuan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan Gender, Kepemimpinan Perempuan, BNKP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk di lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP). Sebagai organisasi keagamaan yang berperan signifikan dalam pengembangan masyarakat, Gereja BNKP memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial, termasuk dalam mengurangi ketimpangan gender. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah upaya dan strategi pemerintah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan nasional.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering kali kurang terwakili dalam posisi strategis atau pengambilan keputusan, meskipun kontribusi mereka terhadap aktivitas gereja dan masyarakat sangat penting.

Sejarah menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, perempuan sering dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam struktur hierarki gereja. Akibatnya, mereka kerap dilarang untuk menduduki posisi-posisi penting atau berpengaruh (Mangililo, 2017). Ketimpangan gender di lembaga keagamaan ini bukanlah fenomena baru. Isu gender ini masih dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks lembaga yang fokusnya bukan pada advokasi kesetaraan

gender. Data yang diperoleh dalam BNKP t menunjukkan bahwa jumlah pendeta perempuan dan laki-laki di Gereja BNKP relatif seimbang, dengan pendeta perempuan sedikit lebih banyak, yakni 359 orang sedangkan laki-laki berjumlah 356 orang. Kesetaraan ini mencerminkan adanya keterbukaan BNKP dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan rohani. Namun, pendeta perempuan masih menghadapi stigma yang menganggap peran mereka tidak setara dengan pendeta laki-laki. Banyak di antara mereka merasa kontribusinya kurang dihargai, meskipun memiliki tanggung jawab yang sama besar. Selain itu, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan penting masih minim, sementara beban kerja yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan dukungan yang diterima.

Salah satu hambatan utama dalam pengarusutamaan gender di BNKP adalah masih kuatnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin. Perempuan yang mencoba mengambil peran lebih besar sering kali dipandang tidak pantas atau bahkan dikritik secara tidak adil. Ketimpangan ini juga terlihat dalam distribusi sumber daya, di mana program-program yang dipimpin oleh perempuan sering kali mendapat dukungan yang lebih sedikit. Meskipun banyak organisasi telah menyadari pentingnya kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, banyak lembaga belum sepenuhnya menerapkan perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan perspektif gender, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam alokasi sumber daya, terutama bagi program-program yang dikelola oleh perempuan (Jurnal MODERAT, 2020).

Penelitian ini ingin menyoroti bagaimana perempuan di Gereja BNKP menghadapi tantangan dalam menjalankan peran mereka. Perempuan yang memimpin komisi sering kali dihadapkan pada stereotipe bahwa mereka hanya cocok menangani isu-isu tertentu, seperti kegiatan sosial atau pemberdayaan perempuan. Sebaliknya, urusan yang dianggap strategis atau terkait pengambilan keputusan besar lebih sering dipercayakan kepada laki-laki. Padahal, setiap komisi memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi gereja. Selain itu,

resistensi terhadap pengarusutamaan gender sering kali datang dari anggota organisasi itu sendiri. Banyak yang menganggap bahwa isu ini tidak relevan atau bahkan mengancam posisi mereka. Padahal, pengarusutamaan gender bukan tentang menghilangkan peran laki-laki, melainkan memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Pengimplementasian strategi ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang berasal dari kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang isu gender serta struktur organisasi yang masih hierarki dan bias terhadap peran tradisional berdasarkan jenis kelamin (Faqih, 2008).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pengarusutamaan gender di lembaga keagamaan dengan judul “Strategi Pengarusutamaan Gender di Lembaga Non Pemerintah: Studi Kasus di BNKP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memformulasikan beberapa pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana strategi pengarusutamaan gender diterapkan di BNKP sebagai lembaga keagamaan non-pemerintah?
2. Tantangan utama apa yang dihadapi BNKP dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam struktur organisasi dan program programnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengarusutamaan gender yang diterapkan di BNKP sebagai lembaga keagamaan non-pemerintah, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadilan gender dalam organisasi.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi BNKP dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam struktur organisasi, program-program, dan pengambilan Keputusan.

II. METODE PENELITIAN

A. Landasan Teori

Pengarusutamaan Gender

Istilah "gender" sering kali disamakan dengan "jenis kelamin" (sex) atau bahkan lebih sering diasosiasikan dengan perempuan. Padahal, untuk memahami ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan, penting untuk membedakan antara konsep gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, vagina, memproduksi sel telur, serta alat menyusui. Sementara itu, gender adalah sifat atau peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan norma sosial atau budaya. Gender bukan merupakan aspek biologis, melainkan konstruksi sosial yang membentuk bagaimana peran laki-laki dan perempuan di masyarakat didefinisikan.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki hak yang setara dalam mengakses peluang, sumber daya, kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat (Kurniawan & Soenaryo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan tanpa menghadapi diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin (Febri, 2022).

Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong kesetaraan gender melalui ajaran dan praktik yang mendukung hak-hak perempuan dan laki-laki secara setara. Dalam penelitiannya, Wospakrik (2021) menekankan bahwa pemahaman kesetaraan gender dalam agama Kristen adalah kunci untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Ia menyatakan bahwa sikap Yesus terhadap perempuan 15 memberikan kekuatan untuk merombak praktik diskriminatif yang sering terjadi akibat penafsiran teks-teks Alkitab yang keliru. Dengan demikian, lembaga keagamaan harus berperan aktif dalam mendidik jemaat

tentang kesetaraan gender dan menghapuskan norma-norma patriarki yang ada dalam masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian "Strategi Pengarusutamaan Gender di Lembaga Non Pemerintah: Studi Kasus di Gereja BNKP" menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi pengarusutamaan gender diterapkan di BNKP serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif perspektif para informan mengenai isu gender dalam konteks gereja, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan organisasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian ini karena pengarusutamaan gender bukan hanya tentang kebijakan formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai, persepsi, dan praktik sosial dalam lingkungan gereja. Melalui wawancara mendalam dengan pendeta perempuan dan pengurus gereja, penelitian ini menggali pengalaman serta hambatan yang mereka hadapi dalam kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga mengamati bagaimana norma sosial dan budaya patriarki masih mempengaruhi peran perempuan di BNKP. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat mengungkap aspek-aspek yang sering kali tersembunyi di balik fenomena kesenjangan gender dalam gereja, seperti stereotipe, marginalisasi, serta ketimpangan dalam alokasi sumber daya dan peluang kepemimpinan.

Dengan demikian, metode kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman deskriptif mengenai strategi pengarusutamaan gender yang telah diterapkan, tetapi juga memungkinkan analisis mendalam terhadap tantangan struktural dan kultural yang masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender di Gereja BNKP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Marginalisasi Perempuan dalam Gereja BNKP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), marginalisasi adalah pembatasan atau usaha untuk membatasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses

yang mencegah individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Marginalisasi perempuan adalah suatu proses sosial yang menyebabkan perempuan tersingkir atau ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan. Marginalisasi ini dapat terjadi melalui kebijakan, budaya, norma sosial, atau struktur organisasi yang tidak memberi kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkembang. Dalam konteks Gereja BNKP, marginalisasi perempuan masih menjadi tantangan meskipun telah ada upaya pengarusutamaan gender dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang Pendeta Perempuan, Salah satu bentuk marginalisasi perempuan dalam Gereja BNKP dapat terlihat dari salah satu contoh nyata yang dapat dilihat dalam dampak Revolusi Hijau terhadap perempuan pedesaan. Revolusi Hijau, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan teknologi modern, justru menciptakan kesenjangan sosial yang semakin memperparah ketimpangan gender. Dalam konteks ini, perempuan di pedesaan semakin terpinggirkan dari sektor pertanian akibat dominasi teknologi yang lebih menitikberatkan pada tenaga kerja laki-laki. Akibatnya, perempuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di sawah, yang berimbas langsung pada meningkatnyakemiskinan dan keterpinggiran mereka dalam masyarakat.

Program ini memperkenalkan berbagai inovasi teknologi, seperti penggunaan benih unggul, pupuk kimia, pestisida, serta alat pertanian modern seperti traktor dan mesin panen. Namun, dalam praktiknya, Revolusi Hijau tidak mempertimbangkan aspek gender, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pertanian. Sebelum Revolusi Hijau, perempuan memiliki peran penting dalam pertanian, mulai dari menanam, merawat tanaman, hingga memanen. Namun, dengan hadirnya alat-alat pertanian modern yang lebih mudah digunakan oleh laki-laki, perempuan mulai kehilangan peran mereka dalam sektor ini. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh perempuan, seperti proses panen dan pengolahan hasil pertanian,

kini telah digantikan oleh mesin. Selain itu, program pelatihan dan distribusi teknologi pertanian lebih banyak ditujukan kepada laki-laki, sehingga perempuan semakin terpinggirkan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Salah satu dampak terbesar dari marginalisasi perempuan akibat Revolusi Hijau adalah hilangnya mata pencaharian perempuan pedesaan. Sebelum diperkenalkannya teknologi pertanian modern, perempuan memiliki akses terhadap pekerjaan musiman di sawah, seperti menanam dan memanen padi. Namun, dengan adanya mesin panen yang menggantikan tenaga kerja manual, banyak perempuan kehilangan sumber pendapatan mereka. Perempuan yang sebelumnya memiliki kemandirian ekonomi kini menjadi lebih bergantung pada laki-laki, sehingga memperburuk ketimpangan gender dalam masyarakat pedesaan.

Fenomena lain dari marginalisasi perempuan dalam sektor pertanian juga terlihat dalam sistem pengelolaan sawah gereja. Sawah gereja adalah lahan pertanian yang dikelola oleh jemaat untuk kemudian hasilnya diberikan kepada para pendeta gereja sebagai bentuk dukungan. Namun, dalam praktiknya, mayoritas pekerja di sawah ini adalah perempuan, sementara laki-laki cenderung menganggap bahwa pekerjaan di sawah adalah tugas perempuan. Peran perempuan dalam mengolah sawah gereja ini mencerminkan bagaimana beban kerja pertanian masih bertumpu pada mereka, sementara laki-laki lebih sedikit terlibat dalam proses produksi pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun perempuan menjadi aktor utama dalam pertanian, pengakuan atas peran dan kontribusi mereka masih minim.

Sedangkan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Departemen Diakonia, Peran perempuan dalam Gereja BNKP telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang kepemimpinan. Jika sebelumnya perempuan lebih banyak berperan dalam tugas-tugas domestik dan pelayanan sosial, kini mereka mulai mendapatkan tempat dalam berbagai aspek penting gereja. Perempuan sudah dilibatkan sebagai anggota aktif dalam tim perumus kebijakan, dewan sinode, dan berbagai komite lainnya. Ini menunjukkan adanya perubahan menuju

kesetaraan gender dalam struktur organisasi gereja. Dalam pengambilan keputusan, perempuan juga telah mulai diberi ruang untuk berkontribusi. Mereka tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga turut serta dalam merancang dan menentukan arah

Subordinasi Perempuan dalam Struktur Gereja

Subordinasi adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dalam konteks sosial, subordinasi sering terjadi ketika satu kelompok dianggap kurang berhak, kurang mampu, atau tidak layak untuk memiliki kekuasaan atau mengambil keputusan. Subordinasi perempuan dalam struktur gereja merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan, meskipun jumlah pendeta perempuan semakin meningkat. Keberadaan mereka sering kali tidak sepenuhnya diterima oleh jemaat maupun struktur kepemimpinan gereja. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan budaya, persepsi jemaat, serta faktor internal dari para pendeta perempuan itu sendiri.

Salah satu faktor utama dalam subordinasi perempuan di gereja adalah persepsi jemaat yang masih menginginkan pemimpin laki-laki. Banyak jemaat beranggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin karena dianggap memiliki otoritas yang lebih kuat dan lebih mampu dalam pengambilan keputusan. Hal ini sering kali didasarkan pada tafsir tradisional terhadap kitab suci yang menekankan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan komunitas. Selain itu, ada anggapan bahwa laki-laki lebih rasional dan tegas dalam menghadapi masalah gereja dibandingkan perempuan yang dianggap lebih emosional. Pemikiran seperti ini membuat perempuan sulit mendapatkan dukungan penuh dari jemaat ketika mereka berada dalam posisi kepemimpinan.

Masalah lain yang muncul adalah rendahnya rasa percaya diri dari pendeta perempuan. Banyak di antara mereka yang merasa kurang kompeten atau tidak yakin bahwa mereka mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga tekanan dari lingkungan yang tidak memberikan dukungan penuh terhadap mereka.

kebijakan gereja. Beberapa perempuan bahkan telah menduduki posisi penting dalam kepemimpinan gereja, termasuk sebagai Praeses. Hal ini menjadi bukti bahwa peran perempuan dalam gereja semakin diakui dan dihargai.

Rasa rendah diri ini juga sering kali diperburuk oleh kurangnya motivasi untuk bersaing. Beberapa pendeta perempuan merasa tidak perlu berusaha lebih keras untuk menunjukkan kapasitas mereka karena sistem kepemimpinan gereja masih cenderung mendukung laki-laki. Akibatnya, mereka cenderung pasif dan tidak memiliki ambisi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam gereja. Selain rendah diri dan kurangnya motivasi, beberapa pendeta perempuan juga dianggap kurang inovatif. Mereka sering kali tidak berani mengambil langkah baru atau mengembangkan program-program gereja yang lebih kreatif. Salah satu alasannya adalah ketakutan terhadap kritik dan penolakan dari jemaat maupun rekan pendeta laki-laki yang masih mendominasi dalam struktur kepemimpinan.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah ketika pendeta perempuan sudah berkeluarga, mereka cenderung mengikuti suami. Banyak pendeta perempuan yang mengorbankan karier dan pelayanannya demi mendukung pekerjaan atau kepindahan suaminya. Hal ini membuat mereka sulit mempertahankan posisi mereka di gereja dan semakin memperkuat anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang stabil dalam gereja.

Stereotipe Gender dalam Gereja BNKP

Stereotipe gender adalah anggapan atau pandangan yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Stereotipe ini sering kali membatasi peran dan potensi seseorang karena didasarkan pada ekspektasi tertentu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks agama dan kepemimpinan gerejawi, stereotipe gender juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipandang dan diperlakukan berdasarkan jenis kelaminnya.

Di dalam Gereja BNKP, terdapat anggapan bahwa laki-laki lebih berwibawa dan tegas dalam memimpin dibandingkan perempuan. Pandangan ini muncul karena dalam budaya patriarki yang masih cukup kuat,

kepemimpinan sering dikaitkan dengan sifat-sifat seperti ketegasan, keberanian, dan otoritas sifat yang secara tradisional lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki. Sebaliknya, perempuan lebih diharapkan memiliki sifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengayomi. Ketika seorang pendeta perempuan menunjukkan ketegasan dalam kepemimpinan, sering kali ia dianggap terlalu keras atau kurang sesuai dengan sifat perempuan yang diharapkan. Sikap tegas yang pada pendeta laki-laki dianggap sebagai tanda kepemimpinan yang kuat, justru bisa dipersepsikan negatif ketika ditunjukkan oleh pendeta perempuan. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda atau ukuran moral dalam menilai kepemimpinan berdasarkan gender. Masih ada pandangan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin, sementara perempuan lebih cocok melayani dalam bidang sosial dan pendidikan. Peran pemimpin sering dikaitkan dengan kemampuan mengambil keputusan besar, memberikan arahan, dan menghadapi tantangan, sedangkan peran dalam bidang sosial dan pendidikan lebih sering dikaitkan dengan sifat mengasuh dan merawat, yang dianggap lebih sesuai untuk perempuan. Pandangan ini berdampak pada kesempatan perempuan untuk mendapatkan peran kepemimpinan di dalam gereja. Meskipun sudah ada pendeta perempuan di Gereja BNKP, mereka masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan yang setara dengan pendeta laki-laki. Ada anggapan bahwa pendeta perempuan lebih cocok mengurus jemaat perempuan dan anak-anak, sementara keputusan-keputusan penting gereja sebaiknya diambil oleh pendeta laki-laki.

Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Gereja

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi karena perbedaan gender, di mana perempuan sering menjadi korban utama. Dalam lingkup gereja, fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam rumah tangga jemaat maupun dalam lingkungan gereja itu sendiri. Salah satu tantangan utama dalam menangani KBG adalah banyaknya korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu, takut stigma sosial, serta kekhawatiran bahwa gereja tidak akan mengambil tindakan tegas. Banyak jemaat

perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk diam karena menganggap bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak boleh dibawa ke ranah publik. Selain itu, ada anggapan bahwa melaporkan kekerasan kepada gereja atau pihak lain dapat memperburuk keadaan, terutama jika pelaku adalah suami atau anggota keluarga yang memiliki posisi sosial atau spiritual yang kuat dalam jemaat.

Kekerasan yang terjadi di lingkup gereja tidak hanya kekerasan fisik, namun kekerasan verbal, berupa penghinaan, ancaman, pelecehan, atau kata-kata kasar yang bertujuan untuk merendahkan atau menakut-nakuti korban. Dalam lingkungan gereja, kekerasan verbal biasanya terjadi dalam hubungan rumah tangga atau dalam interaksi jemaat dengan pemimpin gereja yang menggunakan kata-kata menyakitkan untuk mengontrol atau mendiskriminasi perempuan. Selain itu, kekerasan psikologis juga termasuk dalam kekerasan berbasis gender. Kekerasan Psikologis mencakup manipulasi emosional, isolasi sosial, intimidasi, serta kontrol berlebihan terhadap kehidupan korban. Contohnya, seorang suami mungkin melarang istrinya berpartisipasi dalam kegiatan gereja atau berinteraksi dengan jemaat lain, sehingga membatasi ruang geraknya dan membuatnya merasa tidak berdaya.

Beban Kerja Ganda Perempuan dalam Gereja

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering kali menghadapi beban kerja ganda, yaitu mengelola tanggung jawab di rumah tangga sekaligus menjalankan peran profesional atau pelayanan di gereja. Hal ini juga dialami oleh pendeta perempuan di gereja, termasuk dalam konteks Gereja BNKP. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas-tugas pastoral seperti berkhotbah, membimbing jemaat, dan melayani sakramen, tetapi juga tetap diharapkan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga serta terlibat dalam berbagai kegiatan gereja lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Departemen Diakonia Kantor Sinode dalam wawancara.

Pendeta perempuan sering kali harus membagi waktu antara pelayanan di gereja dan tanggung jawab domestik. Berbeda dengan pendeta laki-laki yang umumnya dapat lebih fokus pada tugas-tugas pastoral, pendeta

perempuan masih memiliki beban tambahan untuk mengurus keluarga, memasak, mengurus anak, serta mengelola rumah. Beban ini menjadi tantangan besar bagi perempuan karena mereka harus memastikan bahwa kedua aspek kehidupannya berjalan dengan baik. Selain tugas-tugas pastoral, pendeta perempuan juga sering kali diharapkan untuk aktif dalam berbagai kegiatan gereja seperti mengajar sekolah minggu, memimpin paduan suara, serta terlibat dalam pelayanan sosial. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ini tidak hanya bersifat sukarela, tetapi sering dianggap sebagai bagian dari kewajiban perempuan dalam gereja. Padahal, tugas-tugas ini bisa lebih terbagi rata jika ada kesadaran akan pembagian peran yang lebih adil. Dalam banyak acara gereja, perempuan juga lebih sering diberi tanggung jawab dalam hal konsumsi, dekorasi, dan kebersihan. Bahkan ketika mereka memiliki posisi kepemimpinan, tanggung jawab ini tetap melekat pada mereka sebagai bagian dari ekspektasi sosial. Hal ini menyebabkan beban kerja mereka semakin berat karena mereka harus mengelola aspek teknis acara sekaligus tetap menjalankan peran pastoral.

Isu lain yang muncul adalah kurangnya pengakuan terhadap beban kerja ganda yang dialami oleh pendeta perempuan. Banyak orang menganggap bahwa tugas-tugas domestik dan kegiatan tambahan di gereja adalah bagian dari kewajiban alami perempuan, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab profesional yang sama dengan laki-laki. Minimnya apresiasi ini membuat banyak pendeta perempuan merasa tidak dihargai meskipun mereka telah bekerja keras. Kesenjangan ini sangat berdampak pada perkembangan karier pendeta perempuan di gereja. Karena mereka lebih banyak dibebani tugas-tugas tambahan. Hal ini dapat menghambat peluang mereka untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam struktur gereja. Beban kerja ganda ini bisa berpengaruh pada hubungan dalam keluarga pendeta perempuan. Tidak jarang mereka mengalami konflik dalam rumah tangga karena pasangan atau anggota keluarga lainnya tidak memahami atau mendukung beban kerja mereka. Hal ini bisa menambah tekanan emosional bagi pendeta perempuan yang sudah menghadapi tuntutan besar dari gereja.

Sosialisasi Ideologi Nilai Peran Gender dalam Gereja

Sosialisasi ideologi nilai peran gender dalam gereja adalah proses di mana norma, nilai, dan harapan mengenai peran gender diajarkan, disebarluaskan, dan diterapkan dalam lingkungan gereja. Proses ini dapat terjadi melalui berbagai saluran, seperti ajaran teologis, khotbah, pendidikan agama, tata ibadah, dan praktik sosial dalam komunitas gereja. Dalam banyak gereja, nilai-nilai peran gender masih sangat kental diajarkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui khotbah. Khotbah yang disampaikan sering kali menekankan peran perempuan dalam keluarga dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini kemudian menjadi pedoman bagi banyak jemaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dalam lingkungan sosial mereka.

Salah satu ajaran yang sering ditemukan dalam khotbah adalah bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Hal ini membentuk pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin utama dalam rumah tangga dan gereja, sementara perempuan hanya berperan sebagai pendukung atau pendamping. Hal ini disalahartikan para jemaat sehingga, perempuan yang ingin meniti karier atau terlibat dalam kepemimpinan gereja sering kali mendapat tantangan besar. Mereka dianggap mengabaikan peran utama mereka sebagai istri dan ibu. Pandangan ini membuat banyak perempuan merasa tertekan untuk memilih antara pengabdian kepada keluarga atau mengembangkan potensi diri di bidang yang mereka minati.

Di sisi lain, laki-laki dalam gereja pun mengalami tekanan untuk selalu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan. Mereka diharapkan untuk kuat, tegas, dan memiliki otoritas, tanpa boleh menunjukkan kelemahan atau perasaan ragu-ragu. Hal ini juga dapat menjadi beban bagi laki-laki yang sebenarnya ingin berbagi peran secara lebih adil dengan pasangan mereka. Meskipun ada banyak tantangan, perubahan mulai terjadi di beberapa gereja yang lebih inklusif. Beberapa pemimpin gereja mulai membuka diskusi tentang kesetaraan gender dan mengkaji ulang interpretasi ayat-ayat Alkitab yang sering digunakan untuk mendukung pandangan

tradisional. Kesadaran ini perlahan-lahan mulai membentuk pemahaman baru tentang peran perempuan dalam gereja dan masyarakat.

Di beberapa denominasi atau gereja tertentu, perempuan juga memegang peran penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Mereka tidak hanya aktif dalam pelayanan, tetapi juga menduduki posisi sebagai pendeta, pengurus gereja, atau pemimpin komunitas. Dalam beberapa kasus, jumlah perempuan dalam kepemimpinan gereja bahkan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur kepemimpinan gereja yang semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aspek spiritual dan administratif.

Tingginya partisipasi perempuan dalam pelayanan gereja dapat dilihat dari keterlibatan mereka yang lebih aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, seperti persekutuan doa, paduan suara, penginjilan, serta pelayanan sosial. Perempuan cenderung lebih konsisten dalam menghadiri ibadah dan kegiatan rutin gereja dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan komunitas gereja dan memperkuat nilai-nilai keimanan di lingkungan jemaat. Namun, di sisi lain, keterlibatan laki-laki dalam gereja cenderung lebih rendah. Sebagian laki-laki merasa kurang tertarik untuk aktif dalam pelayanan karena melihat gereja sebagai ruang yang lebih didominasi oleh perempuan. Selain itu, ada anggapan bahwa tanggung jawab utama laki-laki lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas sosial di luar gereja. Stereotip yang menganggap bahwa ibadah dan pelayanan gereja lebih cocok untuk perempuan juga semakin memperkuat ketidakterlibatan laki-laki dalam kegiatan gereja.

Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada kehidupan jemaat, terutama dalam kepemimpinan spiritual di dalam keluarga. Ketidakhadiran laki-laki dalam kehidupan berjemaat sering kali berakibat pada lemahnya peran mereka dalam membimbing keluarga secara rohani, yang pada akhirnya memengaruhi pola pendidikan agama dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan yang lebih aktif di gereja sering kali harus memikul beban lebih besar dalam berbagai aspek pelayanan,

yang bisa menyebabkan ketimpangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di lingkungan gereja.

Strategi Pengarusutamaan Gender di BNKP

Dalam konteks pengarusutamaan gender, BNKP dapat melibatkan perempuan dalam berbagai tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan program, BNKP dapat memastikan keterwakilan perempuan dalam forum pengambilan keputusan dengan menjadikan mereka anggota aktif dalam tim perumus kebijakan, dewan sinode, atau komite lainnya. Hal ini penting agar suara dan perspektif perempuan dapat terakomodasi sejak awal. Selain itu, pemetaan kebutuhan khusus perempuan juga dapat dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau wawancara dengan perempuan jemaat untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Perempuan dapat dilibatkan dalam musyawarah jemaat, rapat sinode, atau konsultasi regional guna menentukan prioritas pelayanan gereja. Lanjutnya, BNKP bisa mengumpulkan masukan terkait program pemberdayaan ekonomi, pendidikan teologi, atau kesehatan keluarga agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Dalam pelaksanaan program, BNKP dapat memberikan peran strategis bagi perempuan dengan melibatkan mereka sebagai fasilitator, pendamping jemaat, atau pengelola program gereja. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri perempuan tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam pelayanan. Misalnya, perempuan dapat memimpin kegiatan pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan komunitas. Selain itu, BNKP dapat menyediakan ruang kepemimpinan bagi perempuan dengan memberi mereka kesempatan memimpin berbagai kegiatan, seperti ibadah, seminar, atau proyek pelayanan gereja lokal. Misalnya, perempuan bisa diangkat sebagai koordinator program advokasi kesehatan ibu dan anak.

Dalam implementasi program, penting juga untuk mengarusutamakan perspektif gender dengan memastikan bahwa semua kegiatan mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara adil. Sebagai contoh, penyusunan jadwal kegiatan

yang fleksibel memungkinkan perempuan, terutama ibu rumah tangga, untuk berpartisipasi tanpa terbebani tugas domestik.

Pada tahap evaluasi program, BNKP dapat melibatkan perempuan secara aktif dalam proses evaluasi dengan meminta mereka memberikan umpan balik melalui forum evaluasi, survei, atau wawancara. BNKP mengadakan forum evaluasi yang inklusif, di mana perempuan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Pemantauan indikator gender juga perlu dilakukan dengan menyusun indikator keberhasilan yang spesifik gender guna memastikan bahwa program benar-benar berdampak pada pemberdayaan perempuan. Salah satu contoh konkret adalah dengan mengukur jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan atau yang mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Lebih lanjut, penggunaan cerita dan testimoni perempuan yang terlibat dalam program dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga. Dokumentasi pengalaman perempuan, misalnya dari pelatihan pemberdayaan ekonomi, dapat memberikan gambaran nyata tentang dampak program dalam kehidupan mereka. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, BNKP dapat memastikan bahwa perempuan bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam berbagai program pelayanan gereja. Hal ini akan memperkuat peran perempuan dalam komunitas gereja dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Implementasi Program

Implementasi program dalam gereja, khususnya dalam pengarusutamaan gender, telah menunjukkan hasil yang signifikan di berbagai aspek kehidupan jemaat. Salah satu bentuk implementasi yang berhasil adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan gereja, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini. Kepala Departemen Diakonia mengatakan “Di beberapa sinode gereja di Indonesia, perempuan telah berhasil menjabat sebagai pendeta, penatua, atau bahkan ketua sinode. Hal ini terwujud setelah diterapkannya kebijakan melalui penghapusan diskriminasi berbasis gender dalam perekrutan pemimpin gereja serta pemberian pelatihan teologi yang setara bagi perempuan yang hasilnya adalah peningkatan jumlah perempuan

dalam kepemimpinan, perspektif perempuan lebih terintegrasi dalam pengambilan keputusan, serta jemaat perempuan merasa lebih terwakili dan diberdayakan”.

Tabel 1
Data Pendeta dan Vikar BNKP Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
1	Pdt Misionaris		1	1
2	Pdt yang ditempatkan di UEM dan POUK	1	1	2
3	Pdt yang studi lanjut	4	5	9
4	Pdt yang ditempatkan sebagai Dosen STT BNKP Sunderman	4	4	8
5	Pdt yang menunggu penempatan	26	29	55
6	Pdt yang melayani di Instansi Pemerintah	21	14	35
7	Pdt Emeritus (Pensiun)	9	1	10
8	Vikar I	18	55	73
9	Vikar II	26	51	77

Sumber: Perikopen BNKP Tahun 2025

Selain dalam kepemimpinan, gereja juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi jemaat perempuan. Contohnya, BNKP telah menginisiasi pelatihan membuat kerajinan tangan dan pengelolaan koperasi jemaat, yang disertai dengan akses modal usaha melalui dana bergulir gereja serta pembentukan jaringan pemasaran bagi kelompok perempuan. Program ini telah menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga dan gereja, serta memperkuat solidaritas di antara kelompok perempuan.

Upaya lain yang dilakukan adalah advokasi dan pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG). BNKP telah meluncurkan program yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pelatihan advokasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Program ini mencakup penyadaran gender melalui seminar berbasis Alkitab dan kampanye komunitas untuk menciptakan hubungan keluarga yang setara. Dampaknya terlihat pada penurunan laporan kasus KDRT di jemaat, perubahan pola pikir jemaat mengenai peran gender dalam keluarga, serta munculnya pemimpin-pemimpin perempuan yang aktif dalam pelayanan pastoral dan sosial.

Di bidang pendidikan, integrasi gender dalam pendidikan teologi juga telah diterapkan,

seperti di Sekolah Tinggi Teologi BNKP Sunderman. Melalui seminar inklusif gender, mahasiswa teologi diajarkan tentang teologi feminis, keadilan gender, dan penghapusan stereotip gender dalam pelayanan. Dengan demikian, calon pendeta perempuan lebih siap menghadapi tantangan kepemimpinan, laki-laki di lingkungan gereja lebih mendukung peran perempuan, serta perspektif pelayanan gereja menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender.

Tak hanya dalam aspek kepemimpinan dan pendidikan, perempuan juga dilibatkan dalam program penanggulangan bencana. Gereja mengadopsi pendekatan seperti Tagana (Tangguh Bencana), di mana perempuan dilatih menjadi penggerak utama dalam distribusi bantuan serta pendampingan psikososial bagi korban bencana, terutama anak-anak dan perempuan lainnya. Hasilnya, perempuan menjadi agen aktif dalam mitigasi dan pemulihan pasca-bencana, sehingga penanganan bencana menjadi lebih terfokus pada kebutuhan kelompok rentan. Keseluruhan implementasi program ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dapat berhasil jika didukung dengan kebijakan yang jelas, komitmen kepemimpinan yang kuat, serta keterlibatan aktif perempuan dalam setiap tahap proses. Dengan demikian, gereja dapat menjadi wadah yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh jemaatnya.

Tantangan dan Hambatan

Dalam menerapkan pengarusutamaan gender, BNKP menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan budaya, struktur organisasi, serta persepsi jemaat. Salah satu tantangan utama adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Nias. Perempuan sering kali dianggap lebih cocok untuk peran domestik, sementara laki-laki mendominasi ruang publik, termasuk kepemimpinan gereja. Akibatnya, perempuan yang ingin berpartisipasi dalam kepemimpinan gereja sering mengalami resistensi, baik dari jemaat maupun keluarga mereka sendiri. Selain itu, interpretasi teologi yang tidak inklusif gender juga menjadi hambatan. Beberapa tafsiran konservatif terhadap Alkitab kerap digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam pelayanan gereja, seperti pandangan bahwa kepemimpinan gerejawi adalah tugas laki-laki.

Kesadaran tentang isu gender yang masih rendah di kalangan jemaat dan pimpinan gereja semakin memperumit situasi. Banyak yang menganggap bahwa pengarusutamaan gender bukanlah prioritas atau bahkan bertentangan dengan tradisi gereja. Hal ini berdampak pada rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan BNKP, baik karena kurangnya akses terhadap pendidikan teologi maupun karena minimnya kepercayaan diri di kalangan perempuan sendiri. Beban ganda yang harus ditanggung perempuan juga menjadi faktor pembatas, di mana mereka harus mengelola tanggung jawab domestik sekaligus tugas publik, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan gereja.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pengarusutamaan gender. Jika BNKP belum memiliki pedoman resmi atau program pelatihan kepemimpinan khusus bagi perempuan, maka implementasi kebijakan ini akan berjalan kurang optimal. Selain itu, resistensi dari kelompok laki-laki atau pihak konservatif dalam gereja dapat menjadi penghalang, terutama jika mereka merasa terancam dengan meningkatnya peran perempuan dalam kepemimpinan. Ditambah lagi, kurangnya figur perempuan yang dapat dijadikan panutan dalam BNKP membuat generasi muda perempuan kurang terdorong untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam BNKP membutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari perubahan budaya hingga dukungan kebijakan yang lebih konkret.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai strategi pengarusutamaan gender di lembaga non pemerintah: studi kasus di Gereja BNKP, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender dalam Gereja BNKP sudah mulai berkurang, akan tetapi masih terdapat tantangan yang signifikan akibat budaya. Dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender, BNKP masih menghadapi beberapa tantangan termasuk budaya patriarki yang kuat, kurangnya kesadaran terhadap isu gender, rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan,

serta beban ganda yang masih menjadi tanggung jawab perempuan. Ironisnya, dalam beberapa kasus, perempuan sendiri yang enggan memperjuangkan kesetaraan gender karena faktor ketakutan atau ketidakpercayaan diri. Hal ini menegaskan bahwa perubahan dalam perspektif gender masih dalam proses dan memerlukan upaya lebih lanjut. Implementasi strategi pengarusutamaan gender di BNKP telah dilakukan berbagai kebijakan dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk pelatihan bagi perempuan dalam pelayanan, perhatian terhadap isu kekerasan berbasis gender, serta program pemberdayaan yang memberi kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam gereja. Gereja juga telah mulai mengadopsi strategi yang mencakup pemberian akses pendidikan teologi, pelibatan perempuan dalam program gereja, serta pelatihan kepemimpinan yang lebih inklusif.

Dampak positif dari strategi pengarusutamaan gender sudah mulai terlihat, seperti meningkatnya penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan dan perubahan pola pikir jemaat mengenai peran gender. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas strategi ini, gereja perlu memperluas sosialisasi serta memastikan bahwa setiap elemen organisasi berperan aktif dalam mendukung kesetaraan gender. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, BNKP memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mendorong kesetaraan gender. Dengan mengoptimalkan strategi yang sudah ada dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, BNKP dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil gender, sehingga mampu mewujudkan visi gereja yang lebih setara dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Strategi Pengarusutamaan Gender di Lembaga Non Pemerintah: Studi Kasus di Gereja BNKP. Peneliti menyarankan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengarusutamaan gender dalam lingkungan gereja sebagai berikut yang pertama membentuk program pelatihan khusus dengan bantuan dana yang arinya salah satu kendala utama dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender di Gereja BNKP

adalah keterbatasan dana untuk mendukung program-program yang diperlukan. Oleh karena itu, gereja dapat mengatasi kendala ini dengan mencari sumber pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan proposal pendanaan kepada lembaga yang bisa memberikan bantuan, baik yang berasal dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki program pemberdayaan gender. Selain mencari bantuan eksternal, gereja BNKP juga dapat menggalang dana secara mandiri melalui partisipasi jemaat dan komunitas gereja yang peduli terhadap kesetaraan gender. Kampanye kesadaran dapat dilakukan untuk mengajak jemaat berkontribusi secara sukarela dalam mendukung program pengarusutamaan gender. Selain itu, gereja dapat menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana, seperti bazar amal, konser musik, atau program sosial lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan dana guna mendukung pelatihan berbasis gender. Dengan keterlibatan langsung dari jemaat, program ini tidak hanya mendapatkan sumber pendanaan tetapi juga meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesetaraan gender di lingkungan gereja yang kedua memberikan pelatihan berbasis gender untuk pemangku kepentingan artinya agar strategi pengarusutamaan gender di gereja BNKP dapat diterapkan secara efektif, penting untuk memberikan pelatihan berbasis gender kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparatur negara, dan tokoh masyarakat. Pelatihan bagi aparatur negara, seperti pejabat pemerintahan setempat, bertujuan agar mereka dapat mendukung kebijakan gereja yang inklusif dan berbasis gender. Sementara itu, keterlibatan tokoh masyarakat, termasuk pemimpin adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas, diperlukan agar strategi gender dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Materi pelatihan dapat mencakup pemahaman dasar tentang gender dan kesetaraan dalam konteks agama dan sosial, strategi penerapan kebijakan berbasis gender dalam organisasi, serta teknik komunikasi dan advokasi untuk memperkuat dukungan terhadap kesetaraan gender.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahsinin, A., dkk. (2012). Geubrina Raseukiy. (n.d.). *Panduan Bisnis Yang Responsif Gender*. Un Women.
- Arfany, Z. I., & Nikita Fahira Raenisyah. (2023). Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia. *Journal Post*.
- Bu'ulolo, S. (2023). Kepemimpinan Wanita Kristen: Pengaruh dan Tantangan Dalam Konteks Gereja Modern. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 181–199.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Fourth Edition). Pustaka Belajar
- Dachi, O., & Manao, V. I. M. (2021). Pelayanan dan Kepemimpinan Pendeta Perempuan BNKP. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(1), 29–38.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (E. Lingkar & T. Handoko, Eds.). INSISTPress. Yogyakarta.
- Febri, Y. (2024). *Verdict: Journal of Law Science* 3(1) (2024): 26-40 *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan*.
- Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2020). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Jurnal MODERAT*, 6(4), 831–848.
- Ken Akeyla, F., & Lutfhi Fadhillah Universitas Pembangunan Jaya, M. (2023). *Peran Agama Dalam Membangun Kesetaraan Gender: Analisis Terhadap Pemahaman Agama Dan Implementasi Nilai-Nilai Kesetaraan*. 1:1, 1-25.
- Kleden, M. G. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal Kajian Atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya dengan HAM dalam BAB XA UUD 1945*. Surabaya.
- Mangililo, I. D. (2017). IMAGO DEI: Sebuah Upaya Membaca Alkitab Sebagai Perempuan Indonesia Dalam Konteks Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur 1. In *Indonesian Journal of Theology* (Vol. 5, Issue 2).
- Martiany, D. (2012). *Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)*. PUG.
- Nainggolan, J. P., & Zega, Y. K. (2021). *Konsep Kelompok Sel Sebagai Revitalisasi Pendidikan Agama Kristen Dalam Gereja* (Vol. 1, Issue 1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prajna, A., Mahardika, P., Leo., & Tanjung, P. (2024). *MEDIA Jurnal Filsafat dan Teologi Kepemimpinan Perempuan dalam Gereja: Membongkar Mitos dan Meninjau Realitas*.
- Rante Tumba, P., Kandowangko, L., Lahamendu, N., Studi, P., Agama, S., & Manado, I. (2024). Tindakan Sosial Perempuan Gereja Terhadap Ketidakadilan Relasi Gender Dalam Ritual Rambu Solo' Di Jemaat Bori'. In *Sociology of Religion Journal (E)* (Vol. 5, Issue 1).
- Sasongko, S. S. (2007). *Konsep dan Teori Gender* (N. Nangoy, Ed.; dua).
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sumarna, N. (2020). Relasi Agama Terhadap Konsep Gender. *Jurnal Syntax Administration*, 1(6), 737–737.
- Tangirerung, J. R., Wangania, J. D. L., & Tapparan, M. R. (2024). Meneroka kesetaraan dan keadilan gender dalam gereja dan masyarakat Toraja. *KURIOS*, 10(2), 320–333.